

DESENTRALISASI PENDIDIKAN ISLAM

Studi Konsep dalam Pengembangan KBK dan KBS

Yatimin

STAI Tuanku Tambusai Pasirpengarayan, Riau

Abstrak

Pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik menjadikan kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan kebutuhan daerah, kemampuan, standar, penerapan kurikulum yang disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu perlu dilakukan desentralisasi pendidikan agar dapat mendorong terbentuknya kemandirian dalam menentukan kebutuhan pendidikan sesuai dengan daerahnya, berpeluang untuk memberdayakan potensi lokal, dapat memperpendek birokrasi, bersifat elastis dan fleksibel.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Pendidikan Islam dan kurikulum*

Pendahuluan

Desentralisasi adalah bentuk pemindahan tanggungjawab, wewenang dan sumber daya (*sarana, dana dan personil*) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses pemindahan ini, karena daerah yang merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah.¹ Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (e) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada

¹ Lihat: *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Arkala, 2000), hlm. 4-8. di beberapa negara Asia seperti Jepang telah lama dilaksanakan semenjak perang dunia ke 2. Jepang telah mengkombinasikan antara gaya Eropah dan Amerika. Awalnya Jepang lebih condong sentralisasi gaya Eropah daratan seperti Perancis dan Rusia. Setelah perang dunia ke 2 otonomi daerah di Jepang lebih bercorak demokratis ala Amerika. Lihat: Awani Irewati, *Belajar Otonomi Daerah dari Jepang*, Koran Harian *Jawa Pos* Edisi 16 Maret 2001.

pemerintah Daerah Otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.²

Konsekuensinya adalah mengubah editing pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik menuju suatu masyarakat demokrasi terbuka. Oleh sebab itu desentralisasi pendidikan dapat mendekatkan proses pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan ditandai dengan dimulainya masa transisi pengelolaan pendidikan menuju pembangunan pendidikan. Akibat desentralisasi pendidikan, ada daerah yang optimis dan di pihak lain ada yang pesimis. Apapun yang terjadi di daerah, pendidikan dengan segala kendalanya harus segera ditangani secara otonom.

Sistem pendidikan yang berlaku sebelum otonomi bersifat sentralistik, dimulai dari pemberlakuan satu kurikulum secara nasional, sampai dengan peranan pusat yang sangat dominan dalam pengelolaan guru (sekolah negeri). Misalnya, menentukan rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembinaan dan mutasi guru. Demikian pula dari aspek keuangan, gaji guru (PNS) ditetapkan dan dibayarkan pemerintah pusat melalui KPKN.

Dari segi dana di luar gaji yang dialokasikan pemerintah ke masing-masing sekolah, diberikan dengan cara alokasi dana dari pusat ke daerah (kabupaten/kota) berdasarkan jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut. Mekanisme alokasi dana dilakukan dengan perhitungan sejumlah dana yang sama untuk setiap sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, tanpa memperhitungkan jumlah murid, lokasi ataupun tingkat kemakmuran ekonomi daerah. Cara seperti ini jelas mengandung banyak kelemahan, karena Otonomi Daerah dan desentralisasi pendidikan tidak memperhatikan sisi pemerataan (*equity*) dalam pengalokasian dana ke masing-masing sekolah. Begitu pula halnya dengan pengembangan kurikulum. Berkaitan dengan ini, sekolah di beri keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum yang bermanfaat bagi peserta didik, tanpa harus menunggu petunjuk dari pemerintah. Hanya saja,

² Lihat: *Undang-Undang Otonomi Daerah*, hlm. 4. Lihat juga: TAP MPR RI No. IV/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004. Bab IV Butir E Pendidikan No. 3, 4 dan 5.

pengembangan itu harus tetap berdasarkan desain kurikulum nasional yang baku dan berkompentensi standar nasional.³

Salah satu cara dalam mempersiapkan desentralisasi pendidikan⁴ (*berdasarkan UU No. 22 th. 1999*) ialah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar mengajar, khususnya dari sekolah-sekolah unggulan.⁵ Kemudian sekolah yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat, staf pengajar dengan kualifikasi baik dapat merancang sendiri kurikulum yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.⁶

Elemen desentralisasi yang memperkuat *akuntabilitas pendidikan* di daerah adalah: *Pertama*, kepemimpinan yaitu kepala sekolah di pilih oleh komite sekolah dengan menggunakan kriteria yang transparan dan program pengembangan sekolah di susun pada tingkat lokal. *Kedua*, penggalan dana untuk melaksanakan program-program sekolah dapat dilakukan atas restu komite sekolah. *Ketiga*, guru dengan kualifikasi baik harus komitmen terhadap siswa dan sekolah. *Keempat*, kewenangan sekolah diberikan untuk mengubah kurikulum.⁷ Jika pendidikan di atur secara *sentralistik* menghasilkan fenomena sebagai berikut: *Pertama*, lamban berubah dan beradaptasi. *Kedua*, bersifat kaku. *Ketiga*, normatif orientasinya, karena berlapis birokrasi. *Keempat*,

³ Sektor pendidikan merupakan sektor pelayanan dasar yang mengalami perubahan secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya, dengan mengacu pada UU nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000. Lihat: (*Harian Kompas*, 25 Maret 2002), hlm. 8. Lihat juga: Citus <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/17/dikbud/foru09.htm>

⁴ Lihat: Armida S. Alisjahbana, *Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*. Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional "Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia" diselenggarakan Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung. Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, 20 Juli 1999.

⁵ Patrinos (et al), *Decentralization of Education: Demand Side Financing*, (Washington DC: The World Bank Directions in Development, 1997), hlm. 90.

⁶ *Ibid.*, hlm. 191.

⁷ Bray, Mark, *Decentralization of Education: Community Financing*, (Washington DC: The World Bank; Directions in Development, 1996). hlm. 124. Lihat juga: Citus, www.google.com.

memasung kreativitas guru dan siswa. *Kelima*, tradisi dan serimoni penuh kepalsuan.⁸

Desentralisasi pendidikan dapat mendorong terbentuknya kemandirian dalam menentukan kebutuhan pendidikan sesuai dengan daerahnya. Desentralisasi pendidikan berpeluang untuk memberdayakan potensi lokal. Selanjutnya dapat memperpendek lapis-lapis birokrasi antara lain: *Pertama*, cepat berubah (*beradaptasi*) sesuai dengan potensi daerah masing-masing. *Kedua*, bersifat elastis (*tidak kaku*) karena jalur birokrasinya praktis. *Ketiga*, orientasinya fleksibel tidak harus menunggu petunjuk dari pusat (*artinya daerah dapat mengambil inisiatif sendiri sesuai dengan kebutuhannya*). *Keempat*, memberi kesempatan kepada daerah untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. *Kelima*, menekan tradisi serimonial yang selama ini penuh kepalsuan yang tidak bermakna.

Desentralisasi pendidikan melahirkan warga negara yang inofatif. Dapat bersaing tetapi juga bekerja sama membangun suatu masyarakat yang demokratis. Maka yang dibutuhkan bagaimana komitmen, visi dan misi daerah untuk terus meningkatkan kualitasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tipologi komponen sektor pendidikan yang dipertimbangkan untuk didesentralisasikan: *Pertama*, organisasi dan poses belajar mengajar di sekolah. *Kedua*, siswa menentukan sendiri sekolah mana yang ingin dimasuki. *Ketiga*, waktu belajar di sekolah diefektifkan secara maksimal sesuai kebutuhan. *Keempat*, penentuan buku yang digunakan. *Kelima* kurikulum.⁹

Kurikulum sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan selalu mendapat sorotan masyarakat termasuk pejabat, ilmuwan, kalangan industri dan orang tua. Winarno Surakhmad mensinyalir bahwa kurikulum yang diciptakan untuk memecahkan masalah

⁸ Lihat: Bailey, William J, *School-Site Management Applied*. (Lancaster-Basel: Technomic Publishing CO.INC 1991). Lihat juga; http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/27/manajemen_berbasis_sekolah.htm.

⁹ Lihat: Burki, (et al), *Beyond the Cente: Decentralizing the State*, (Washington DC: The World Bank, 1999), hlm. 57.

tertentu, ternyata lahir justru sebagai masalah.¹⁰ Oleh karena itu, pengembang kurikulum harus dapat menganalisis, mengadakan koreksi terhadap kekurangannya dan mencari alternatif pemecahan masalah yang kreatif, inovatif dan misioner. Tap MPR tentang GBHN Tahun 1999-2004 butir E poin 3, 4 dan 5 mengenai pendidikan menyebutkan bahwa:

- Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat di dukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- Melakukan pembaharuan, pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.¹¹

Pasal 37 UU No.2 Tahun 1989, mengisyaratkan bahwa kurikulum mesti dapat memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik agar mampu:

- (1) Mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan dan kemampuan mengembangkan diri.
- (2) Kemampuan akademik profesional untuk menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kesenian.¹²

Masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaan mempunyai landasan yang berbeda di setiap daerah. Kurikulum pendidikan mesti sesuai dengan kondisi daerah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa

¹⁰ Lihat: Winarno Surakhmad, *Mencari Paradigma Kurikulum Masa Depan*, (Makalah tdk dipublikasikan) disampaikan pada seminar Orientasi, Kurikulum, di Pusat Kurikulum Bogor, 27 Maret - 29 Maret. 2000.

¹¹ Lihat: MPR RI, *TAP MPR*, RI Nomor IV/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bab IV Butir E; Pendidikan, 1999, nomor 3, 4 dan 5. Lihat juga: citus http://www.pdk.go.id/publikasi/Masadepan/III_XVIII_2001/Menyatukan_Visi.htm.

¹² Lihat: *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU RI No.2 Tahun 1989 dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

pengembangan kurikulum merupakan kedudukan yang penting sebagai akar pendidikan.¹³

Winarno Surakhmad menyatakan bahwa kurikulum masa depan ialah kurikulum yang mengutamakan kemandirian, menghargai kodrat hak hak prestasi manusia. Ini berarti dalam pengembangan kurikulum harus konkrit bersifat empiris dari suatu komunitas sosial daerah, tidak dapat dipisahkan dari tuntutan kemampuan daerah itu sendiri.¹⁴

Dari uraian tersebut berarti desentralisasi mencakup lima aspek penting, yaitu: *Pertama*, organisasi dan poses belajar mengajar perlu dikembangkan. *Kedua*, siswa dapat menentukan sendiri sekolah mana yang disukai. *Ketiga*, waktu belajar disesuaikan dengan kebutuhan secara maksimal. *Keempat*, guru dan siswa dapat penentuan buku yang digunakan. *Kelima*, penggunaan konsep kurikulum pendidikan di daerah dapat dioptimalkan.

Pengertian Desentralisasi

Secara harfiah *de* berarti tidak dan *sentral* berarti terpusat. Desentralisasi dalam pemerintahan bermakna sifat pemerintahan yang lebih banyak memberikan otonomi kepada pemerintah daerah.¹⁵ Noah Meriam mendefinisikan bahwa desentralisasi merupakan tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.¹⁶

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 butir (e) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

¹³ Ki Hajar Dewantara. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian I: Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa, 1946), hlm. 15.

¹⁴ Lihat: Print. M. *Curriculum Development and Design*, (St. Lionard: Allen & Unwim Pty, Ltd. 1993), hlm. 195.

¹⁵ Yus Badudu, M. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 336.

¹⁶ Noah Meriam, *Dictionary Of The English Language*, Secont edition, (William Collin Publishers, Co, 1980), hlm. 470.

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 1999), Pasal 1 Butir (E).

Richar M. Bird, menyebutkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada daerah sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk didalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya.¹⁸

Mondy dan Premeeux menyebutkan *Decentralization is the condition that exist when a significant amount of authority is delegated to lower level in the enterprise*. Desentralisasi ialah kondisi yang terdapat jika sejumlah wewenang yang berarti didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah.¹⁹

Menurut Sumardi HS desentralisasi merupakan sebuah dorongan untuk meningkatkan kemampuan lokal (*daerah*) agar berpartisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan daerah. Memberikan kesempatan lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan kebijaksanaan sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan mereka sendiri.²⁰

Sumardi dan Fakry Gaffar, mengemukakan pengertian desentralisasi sebagai sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada keberagaman, sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan. Memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidak samaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional dan universal sekalipun.²¹

R.O Slater menyebutkan, desentralisasi pada dasarnya hanya sekedar penggambaran pembagian kekuasaan dalam organisasi atau sistem sosial. Gambaran tersebut rancu karena interpretasi bernada

¹⁸ Ricard.M Bird, Francois Vallaucourt, *Viscal Decentralization In Developing Countries*, terj, Al Mizal Ulfa, (Cambrigade University, 2000), hlm. 122.

¹⁹ Daniel Kammars, *Bahan Kuliah Teknologi Pendidikan*, Untuk mahasiswa Pendidikan Islam PPS IAIN SUSQA Pekanbaru, Tidak dipublikasikan, hlm. 3.

²⁰ Sumardi HS, *Relevansi Pendidikan Ditinjau Dari Kepentingan Nasional*, Wilayah Dan Peserta Didik, dalam jurnal *Mimbar Pendidikan*, Nomor. 3 Tahun IX, Oktober 1990, hlm. 26.

²¹ Fakry Gaffar, *Implikasi Desentralisasi Pendidikan Menyongsong abad 21*, Dalam Jurnal Pendidikan Tahun 3 Oktober, Tahun IX, 1990. hlm. 18.

emosional dalam terminology strukturalis.²² Kerancuan dapat difahami karena pembagian kekuasaan itu merupakan suatu proses yang sangat politis. Artinya distribusi kekuasaan berpengaruh terhadap pergeseran penggunaan berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam konteks distribusi kekuasaan. Melibatkan otoritas lokal dan otoritas yang lebih tinggi, yakni pemerintah pusat. Oleh karena itu wajar apabila sentralisasi dan desentralisasi di pandang sebagai dua kontinum pusat kekuasaan semata-mata dan bukan sebagai strategi management.²³

Varghese menjelaskan bahwa konsep desentralisasi mempunyai pengertian sebagai pengalihan kekuasaan (*devolution of power*) dan wewenang (*authority*). Untuk mempersiapkan perencanaan sesuai karakteristik daerah perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Perencanaan daerah mempunyai wewenang untuk memformulasikan tergetnya sendiri termasuk penentuan strategi untuk mencapai target tersebut dengan mengacu pada tujuan nasional.
2. Perencanaan daerah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memobilisasi sumber-sumber lokal. Mempunyai kekuasaan untuk merombak sumber-sumber yang telah diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.
3. Perencanaan daerah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (*pemerintah pusat*), yaitu posisi unit yang lebih rendah bukan sebagai bawahan melainkan sebagai mitra dari unit pusat.²⁴

Untuk memahami pengertian desentralisasi secara *konprehensif* ada lima istilah yang berkaitan dengan desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah.

²² R.O Slater, *On Centralization And School Restructuring A Socioological Perspektive*, (London: The Falmer Press, 1993). hlm. 175-180.

²³ Udik Budi Wibowo, *Pergeseran Pengelolaan Pendidikan Dari Sentralisasi Ke Desentralistik*, (Jurnal Dinamika Pendidikan, FIP-UNY, 2000). hlm. 13.

²⁴ Ricard. M Bird, *Op.cit.*, hlm. 123.

2. Desentralisasi merupakan penyerahan tanggung jawab layanan sektor tertentu oleh perwakilan pemerintah pusat kepada perwakilan pemerintah daerah.
3. Desentralisasi merupakan pengalihan tanggung jawab membuat keputusan untuk mengatur layanan publik kepada pemerintah daerah.
4. Dalam sistem desentralisasi pemerintah pusat mengalihkan wewenang pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada daerah.
5. Dalam sistem desentralisasi pengalihan wewenang sektoral dapat dibebankan kepada usaha-usaha swasta.²⁵

Secara filosofis sistem desentralisasi berpeluang untuk memberdayakan potensi lokal dan merupakan jalan keluar yang jitu untuk menghindari kelemahan yang terdapat pada sistem sentralistik. Jadi desentralisasi dapat disimpulkan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambil-alihan keputusan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah. Namun tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mendorong terciptanya kemandirian. Percaya terhadap pemerintah daerah. Kemudian pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

Tujuan Desentralisasi Pendidikan

Di era otonomi daerah terakhir ini terjadi pergerakan global. Pergerakan tersebut menuju model desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Juga sebagai akuntabilitas, transparansi pemerintahan, efektifitas ekonomi dan kesamaan akses terhadap pelayanan. Usaha ini baru memperoleh titik terang dengan terbitnya dua undang-undang tentang pemerintahan dan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah yang diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) nomor. 25 tahun 2000 tentang kewenang pemerintah provinsi sebagai daerah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

otonomi. Disebutkan bahwa tujuan desentralisasi daerah adalah untuk memperbaiki pelayanan publik. Pemerintah daerah harus menempatkan pegawai dan guru yang professional untuk pelayanan yang dimaksud. Perbaikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada organisasi daerah dan masyarakat dalam tata kehidupan sehari-hari.²⁶

Selanjutnya secara umum tujuan desentralisasi ialah:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan masalah-masalah otonomi di tingkat daerah.
2. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan usaha sosial ekonomi pada tingkat daerah secara lebih realistis.
3. Melatih rakyat untuk dapat lebih mengatur urusannya sendiri.
4. Membina kesatuan nasional.²⁷

Desentralisasi memberikan keleluasaan kepada masyarakat setempat untuk mengoptimalkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Membuat keputusan dan pelaksanaan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Namun keputusan yang diambil tetap berkaitan dengan sistem yang lebih besar.²⁸ Desentralisasi meningkatkan pembiayaan diberbagai bidang pembangunan. Dengan desentralisasi ini pemerintah daerah dapat lebih mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan daerah, termasuk melibatkan para stakeholder (*pihak-pihak yang berkepentingan*) dalam bidang pendidikan. Tujuan yang kongkrit adalah untuk berperan lebih aktif dalam membiayai pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan direncanakan, dibiayai, disupervisi, diawasi, dievaluasi secara berkesinambungan, efektif dan efisien. Dengan cara ini, maka hasil-hasil yang dicapai dapat dioptimalkan. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan hasil yang optimal. Untuk kelancaran tersebut perlu

²⁶ Lihat: Lembaga Penelitian SMERU, Juni 2002, <http://www.smeru.or.id/report/field/dampakotdantb/dampakotdantb.pdf>.

²⁷ Fasli Jalal, (ed), *Pendidikan Dalam konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicipta, 2001). hlm. 123.

²⁸ R.Nuriana, *Format Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Serta Pertumbuhan Otonomi Daerah*, dalam artikel of <http://id.appsi.or.id/Artikel/mformat.htm>.

manajemen terpadu, trampil dan berdaya guna. Tanpa ini semua, apa yang diharapkan tidak akan tercapai.²⁹ Akan muncul sumber-sumber inefisiensi, inefektivitas serta ketidakadilan baru di Daerah-daerah yang dapat menjadi pemicu bagi terjadinya krisis multidimensional seri kedua. Oleh karena itu, untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika persoalan yang dihadapi. Manajemen menjadi faktor yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi pendidikan dalam bentuk manajemen yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat desentralisasi pendidikan merupakan proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan akan berada di pihak Pemda dan DPRD, maka peranan politik lebih mencerminkan kehendak daerah beserta masyarakat yang akan memakainya. Kalau desentralisasi hanya memindahkan masalah pendidikan dari pusat ke daerah, tentu saja Tujuan desentralisasi pendidikan-antara lain merangsang peran masyarakat dalam pendidikan-tidak akan tercapai.³⁰

Pemberdayaan daerah, yaitu bagaimana daerah mampu merencanakan pendidikan dengan segala macam elemennya sangat diperlukan dalam desentralisasi pendidikan. Hal ini mengingat agar tidak terkesan memindahkan segala masalah pendidikan selama ini dari pusat ke daerah. Secara keseluruhan, meskipun UU otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan politik, namun tujuan desentralisasi adalah untuk mencapai efisiensi administrasi dengan menyertakan elemen rakyat dalam pemerintahan lokal.³¹

Dengan desentralisasi pendidikan, berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru-guru, siswa, orang tua dan para ahli akan tertantang

²⁹ Lihat: Sadu Wasistiono, *Menata Ulang Manajemen Pemerintah Daerah di Indonesia*, Dalam Citus <http://id.apps.or.id/Artikel/mmenata.htm>.

³⁰ Lihat: Kompas, *Tanpa Pemberdayaan Sekolah Makna Otonomi Akan Berkurang*, dalam Citus <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0101/12/dikbud/tanp09.htm>

³¹ Lihat: Sayuti, *Otoda Kebijakan Yang Tak Nyata*, techno 5 dalam Citus <http://www.brarijaya.ac.id/student/techno/sajut.%20techno5a.htm>

untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pendidikan terutama para siswa dan orang tua. Praktisi pendidikanpun akan bekerja dengan baik agar kerja mereka dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi siswa. Jika terjadi output pendidikan kurang bermutu, maka semua pihak di daerah akan bertanggung jawab untuk memeperbaikinya. Karena rencana, pelaksanaan, supervisi, pengawasan dan evaluasi telah dilakukan oleh berbagai fihak yang terkait dengan daerah itu sendiri. Disamping itu adanya kompetisi mutu antar daerah akan memacu tiap daerah untuk menghasilkan mutu terbaik.

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mencari cara baru, bahan ajar baru, kompetensi baru dan motivasi baru dalam memperbaiki inovasi memperbaiki kuantitas, kualitas dan relevansi hasil-hasil pendidikan. Makin majunya transportasi dan komunikasi antar daerah satu dengan yang lainnya, bahkan dengan negara lainnya, akan mempermudah daerah memperoleh ide-ide baru dan cara-cara baru yang dapat di terapkan oleh daerah yang lebih mudah melakukan inovasi dalam pendidikan karena fasilitas desentralisasi pendidikan ini.³² Desentralisasi juga dapat mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal, sekaligus untuk mencapai objektif pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Tujuan desentralisasi pendidikan sangat bervariasi. Berdasarkan pengalaman, desentralisasi pendidikan dapat dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, (*di Amerika Serikat dan Eropa*). Sebagai contoh di Kolombia disentralisasi ditentukan oleh kebutuhan para pemimpin politik guna melanggengkan kredibilitas mereka sendiri dan memupuk

³² Dachnel Kamars, *Op.cit.*, hlm. 18-20.

persatuan yang terus diguncang oleh kekerasan dan kekacauan.³³ Di Honggaria undang-undang pendidikan tahun 1985 memberi wewenang kepada sekolah untuk mengatur sendiri tugas dan sistem pendidikannya.³⁴

Jika yang menjadi tujuan desentralisasi adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari daerah kepada Dewan Sekolah. Secara implisit desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*school resources*) dan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.

Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar-mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.³⁵

Kendala Desentralisasi

Ada beberapa kendala kebijakan dan kelembagaan dalam melaksanakan desentralisasi dengan efektif dan efisien di Indonesia. Kendala tersebut antara lain; kurangnya pengalaman dan buruknya kapasitas organisasi pemerintah Indonesia di semua level, sistem informasi keuangan yang kurang memadai dan sikap pegawai negeri yang sudah mengakar.³⁶

³³ Edward B. Fieske (editor), *Decentralization Of Education, Politics And Consensus*, (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 1996). hlm. 24.

³⁴ Gabort Halaz, *The Policy of school Autonomy And The Reform Of Educational Administration*, (Tidak dipublikasikan, 1992). Makalah ini dipresentasikan pada The Eighth World Congress of Comparative Education. Tanggal 8 - 14 Juli 1992 di Pregue.

³⁵ Burki, (et al), *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Methodology*, (Washington D.C: E. Perry and William R. Dillinger, 1999). hlm. 57.

³⁶ Lihat: Panduan kajian Pembangunan Pemerintah Daerah. Pada Citus; <http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg1/pg16i.htm>

Adapun kendala desentralisasi yang terjadi di daerah adalah:

1. Kurangnya pengalaman dan kapasitas keorganisasian

Pemerintah pusat dan daerah. Kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan di dalam memenej, merencanakan dan melaksanakan pelayanan yang terdesentralisasi. Terjadi kebingungan didalam membedakan antara tanggung jawab, wewenang dan peran pemerintah daerah dengan pusat. Juga masih terdapat kecenderungan untuk menunggu persetujuan atau instruksi dari atasan, walaupun fakta memperlihatkan bahwa hubungan *hirarki* antara level-level pemerintahan telah dihapus oleh undang-undang desentralisasi yang baru.

2. Terbatasnya sistem informasi keuangan

Sistem informasi keuangan dan manajemen lainnya dalam pemerintahan cenderung terfokus pada ketersediaan dan penggunaan input dan bukan pada biaya untuk menghasilkan output dan pelayanan. Tidak terdapat analisis dan standar baku terhadap biaya pemberian pelayanan pada level daerah. Ini akan menyulitkan pemerintah otonomi untuk mengetahui berapa sumber keuangan yang dibutuhkan untuk desentralisasi, baik itu dalam bentuk pendapatan lokal ataupun transfer antar pemerintah.

3. Desentralisasi tidak mengarah untuk peningkatan partisipasi

Salah satu prinsip utama undang-undang desentralisasi baru tersebut adalah meningkatnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui administrasi pemerintah daerah yang lebih responsif (*misal: Kepala pemerintahan kabupaten yaitu Bupati - sekarang dapat diminta jawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat-DPRD dalam elasanakan tugasnya*). Namun masih terdapat resiko yang mungkin terjadi yaitu apabila pemerintah daerah yang memiliki otonomi tetap memberlakukan proses *top-down*. Selanjutnya, anggota masyarakat dapat saja merasa enggan menggunakan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proses politik, mungkin karena mereka tidak tahu atau tidak disadari,

ataupun karena mereka tidak percaya terhadap sistem yang akan memperjuangkan kebutuhannya.³⁷

Hambatan yang lain dalam implementasi desentralisasi adalah kesiapan dari tiap daerah yang tidak merata.³⁸ Selanjutnya kurangnya pengalaman dan buruknya kapasitas organisasi pemerintah Indonesia. Hambatan yang lain dalam implementasi desentralisasi adalah kesiapan dari tiap daerah yang tidak merata. Langkah-langkah besar untuk memperkenalkan peningkatan otonomi daerah dan usaha-usaha untuk mengenali peran, tanggung jawab dan fungsi lembaga pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten dalam menghadapi isu desentralisasi baru, kini berlangsung. Pemerintah daerah lebih bertanggungjawab terhadap pemilih mereka dengan menghilangkan hubungan-hubungan pelaporan yang hierarkhis antara tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.³⁹

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya antara lain; mendukung badan-badan pemerintah pusat dengan membantu mereka untuk meninjau ulang visi, misi, dan strategi mereka terhadap kebijakan dan panduan, dari pada hanya pelaksanaan proyek, *me-reorientasi* sistem informasi manajemen; mengkaji isu-isu kebijakan di seputar pengenalan model penyediaan pelayanan alternatif. Pemerintah daerah juga akan membutuhkan dukungan. Rangkaian langkah-langkah yang bisa ditempuh pada berbagai tingkatan pemerintah untuk memperkenalkan desentralisasi. Rangkaian tersebut dijelaskan dibawah ini.

Lembaga-lembaga pusat membutuhkan bantuan dan pelatihan untuk:

1. Memfokuskan kembali visi, misi dan strategi dengan cara memberikan pedoman dan arah kebijakan tanpa membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk membangun proyek dan programnya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal.

³⁷ Lihat: Citus <http://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm>

³⁸ Lihat: Citus; <http://www.clgi.or.id/newsletter/edisi-01/CLGI.asp>

³⁹ Lihat: *Ibid*.

2. Mere-orientasi sistem manajemen informasi melalui pencapaian dan pengawasan output yang spesifik, ketimbang mengontrol input dan mengawasi implementasi fisik proyek-proyek nasional.
3. Mengurangi proporsi anggaran belanja nasional yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek nasional dan lebih mengutamakan pada bantuan untuk pemerintah daerah.
4. Menilai isu ekonomi, sosial dan kebijakan yang melingkupi masalah pengenalan penyedia pelayanan alternatif, seperti sektor swasta atau LSM dan untuk memperkenalkan pengadaan pelayanan gaya baru.⁴⁰

Kurikulum Berbasis Kompetensi

KBK ialah singkatan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum, secara bahasa (*etimology*) berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* berarti pelari dan *curere* berarti tempat berpacu.⁴¹ Kurikulum ialah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa di bawah bimbingan sekolah, baik luar maupun di dalam lingkungannya.⁴² Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sangat dipengaruhi oleh pengertian kurikulum yang di anut seseorang yaitu adanya nilai relevansi antara kompetensi kurikulum dengan tuntutan kebutuhan yang ada dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat.⁴³ Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, kurikulum berbasis kompetensi ialah suatu dasar kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu.⁴⁴

⁴⁰ Lihat: Citus; [htt://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm](http://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm)

⁴¹ Azwir Salam, *Dalam Potensia*, Jurnal Kependidikan Islam, Vol 2, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah, 2003), hlm. 36.

⁴² Zakiah Daradjad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 83.

⁴³ Andi Haris Prabama dan Siti Zuhriah Ari Atmi, *Paradigma pengembangan Kurikulum Pendidikan tinggi Tahun 2000*, Cet 1, (Surabaya: Muhammad University Press, 2002), hlm. 103.

⁴⁴ Dekdikbud, *Pedoman pengembangan silabus*, (Jakarta: Dirjen Depdikbud, 2003), hlm. 10.
56

Berdasarkan Keputusan Mendiknas RI No.045/U/2002 Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. KBK merupakan program pembelajaran yaitu hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dapat di capai oleh siswa, sistem indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis semenjak perencanaan dimulai.

Belajar mengajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Guru memberikan dorongan kepada siswa dengan menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan, menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab siswa dalam belajar sepanjang hayat.

Dalam KBK pembelajaran setiap mata pelajaran di tuntut untuk menampilkan realitas keseharian, mempertimbangkan realitas keseharian, mempertimbangkan kompetensi siswa, mengakomodasi budaya lokal maupun global, menampilkan fenomena aktual dari setiap perkembangan ilmu, memetakan indikator pencapaian hasil belajar dengan keterampilan hidup. Arinya KBK benar-benar harus memenuhi konsep pembelajaran multi dimensi yang bukan sekadar menampilkan materi-materi, melainkan harus memenuhi konsep populer, seperti kiat dan pertolongan mandiri.

Kurikulum berbasis kompetensi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi baik individual siswa maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar (*Learning Out Comes*) dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.⁴⁵

Program pengembangan KBK dimulai dari tingkat pusat yaitu Depdiknas sebagai pemegang lembaga pendidikan dan sekolah

⁴⁵ Lihat: Is Joni Ishaq, *Dalam Rian Pos*, Ahad 21 September 2003, hlm. 28.

sebagai pelaksana pendidikan di daerah. Pengembangan KBK tingkat pusat dan sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan tingkat pusat adalah sebagai berikut:
 - a. Tujuan pendidikan nasional ialah segala sesuatu yang ingin di capai suatu bangsa.
 - b. Kompetensi lintas kurikulum ialah kurikulum berkuasa khusus.
 - c. Kompetensi lulusan, tamatan, kognitif dan kepribadian ialah kewenangan dalam memutuskan.
 - d. Standar kompetensi mata pelajaran ialah dasar keahlian dari mata pelajaran.
 - e. Kompetensi Dasar (KD) ialah dasar dari suatu keahlian mata pelajaran.
 - f. Materi Pokok (MP) ialah materi pelajaran yang khusus
 - g. Indikator pencapaian kompetensi (IPK) ialah harapan yang ingin di capai.
2. Pengembangan tingkat sekoah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan silabus ialah pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber dan alat disesuaikan dengan kemampuan sekolah.
 - b. Penilaian ialah jenis soal ujian/tes dan manajemen hasil ujian dikelola secara maksimal oleh sekolah.

Adapun aspek-aspek KBK dalam proses pembelajaran system KBK adalah sebagai berikut:

1. Aspek filosofis, aspek ini mempunyai dua unsur penting yaitu:
 - a. Kompetensi lulusan artinya sekolah berwenang untuk memutuskan seseorang siswa lulus atau tidak, naik kelas atau tinggal kelas.
 - b. Standar kompetensi artinya kemampuan dasar yang dimiliki siswa di ukur dengan kemampuan standar nasional dan daerah. Standar ialah sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang syah, ukuran, takaran dan timbangan.⁴⁶ Standar kompetensi yang terdapat pada KBK

⁴⁶ Poerwadarminta, *Kamus umum babasa Indonesia* Cet :12 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 964.

- memiliki empat kriteria yaitu; [1] Struktur keilmuan, artinya susunan profesi yang ahli di bidang ilmunya masing-masing; [2] Perkembangan psikologi siswa, artinya kemajuan jiwa siswa di ukur dengan standar kecakapan dan psikologis siswa; [3] Standar kompetensi negara, artinya dasar syah yang di pakai oleh setiap negara dibandingkan dengan negara yang lebih maju; [4] Perkembangan dan tuntutan masyarakat, artinya dalam bidang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan yang berlaku di suatu daerah dengan memperhatikan potensi daerah.
- c. Indikator pencapaian kompetensi, artinya pencapaian hasil belajar dioptimalkan dan harus mencapai standar nasional.
 - d. Materi pokok, artinya penyajian materi disesuaikan dengan kurikulum berbasis sekolah. Sekolah di beri hak untuk mengelola bahan ajar yang disajikan pada siswa sesuai dengan visi dan misi sekolah.
 - e. Pengalaman belajar siswa, artinya siswa di beri kebebasan dalam belajar dan guru sifatnya membimbing hingga tuntas.
 - f. Alokasi waktu disesuaikan dengan materi pembelajaran.
 - g. Sumber bahan dan alat, artinya bahan-bahan pembelajaran di gali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada GBPP yang ditetapkan secara nasional.
 - h. Fokus kepada kognitif, psikomotor dan efektif
2. Aspek tujuan, yaitu arah, haluan dan jurusan yang dituju.⁴⁷ Dalam sistem KBK proses pembelajaran mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. Siswa mencapai kompetensi tertentu sesuai kompetensi yang ditetapkan.
 - b. Guru menggunakan bahan ajar dengan memanfaatkan sumber daya alam di luar dan di dalam sekolah.

⁴⁷ Pusat Pembinaan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 965.

- c. Memberikan gelar akademik sesuai jenjang yang di tempuh siswa.
 - d. Siswa mampu memecahkan masalah-masalah lingkungan yang timbul pada saat tertentu.
3. Aspek proses belajar mengajar, yaitu suatu urutan pengalaman siswa terhadap pengarahan guru dalam pembelajaran.⁴⁸ Aspek-aspek proses belajar mengajar pada sistem KBK ini adalah sebagai berikut:
- a. Aspek siswa yaitu belajar bersifat individual dan klasikal.
 - b. Aspek tenaga pengajar yaitu guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek pendidikan.
 - c. Aspek proses belajar yaitu pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar sekolah disesuaikan dengan kompetensi sekolah.
 - d. Aspek penilaian yaitu cara penilaian ditentukan berdasarkan standar yang diberlakukan di masing-masing sekolah dengan berpedoman standar nasional dan daerah.
4. Alokasi waktu, yaitu suatu kesatuan yang digunakan dalam bentuk jumlah jam dalam tempoh yang ditentukan. Alokasi waktu di sini dimaksudkan untuk menentukan suatu kemampuan dasar tertentu diperhitungkan berdasarkan analisis dan pengalaman penggunaan jam belajar dalam mencapai suatu kemampuan dasar di kelas.
5. Sumber bahan, yaitu keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Bahan ialah segala sesuatu yang dapat di pakai untuk tujuan tertentu seperti pedoman atau pegangan untuk mengajar. Adapun sumber bahan berupa buku teks, buku kurikulum, jurnal, hasil penelitian, terbitan berkala, dokumen negara, peralatan utama penunjang pembelajaran, media cetak, hasil penelitian perpustakaan, lingkungan sekitar, nara sumber dan karya wisata.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 615.

6. Pengembangan silabus, yaitu urutan materi pelajaran yang ditentukan untuk tiap-tiap jenjang kelas dalam sebuah lembaga pendidikan. Pada sistem CBSA silabus merupakan program satuan pelajaran dan analisis materi pelajaran. Silabus pada sistem KBK memuat hal-hal pokok sebagai berikut:
 - a. Identitas mata pelajaran yaitu memuat nama mata pelajaran, kelas, semester dan satuan waktu.
 - b. Media yang digunakan untuk pembelajaran yaitu media pengajaran dalam bentuk alat praga, media cetak dan elektronik.
 - c. Strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dengan materi dari sumber pokok untuk menguasai kompetensi dasar.
7. Materi pokok, yaitu materi yang harus dipelajari oleh siswa ialah materi yang tercantum dalam GBPP. Bila perlu siswa di berikan program pengayaan dan guru harus menguasai lebih dari apa yang tercantum dalam GBPP.⁴⁹
8. Penerapan KBK di Sekolah, Sistem KBK baru diterapkan efektif pada tahun ajaran 2004/2005 di sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Dalam sistem KBK pengembangan silabus merupakan acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran.

Nilai dalam bahasa Inggris *value*.⁵⁰ Dalam bahasa Latin *valere* berarti berguna, mampu, berdaya dan berlaku.⁵¹ Penilaian ialah pemberian nilai (*biji, kadar, mutu dan harga*), yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang kegiatan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.⁵² Penilaian mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

⁴⁹ Depag, *Petunjuk Pelaksanaan PBM*, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁵⁰ John M Echols, Hassan Sadily, *Op.Cit.*, hlm. 626.

⁵¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet 11, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 713.

⁵² Depag, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Ujian menggunakan berbagai teknik performance test, objektif tes dan penilaian port folio. Penilaian hasil belajar mengacu kepada indikator pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dalam kurikulum. Setiap kemajuan hasil belajar siswa dilaporkan dalam bentuk deskriptif yang memberikan gambaran hasil belajar. Penilaian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa dan wali murid agar memahami potensi siswa yang dimiliki.
2. Guru menentukan tindak lanjut bagi pengembangan diri siswa dengan memperhatikan potensi dasar.
3. Pihak yang berkepentingan untuk perbaikan program pembelajaran dan silabus.

Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penilaian harus di dukung oleh adanya pemahaman perkembangan tingkat kemajuan siswa dalam menguasai setiap kompetensi dasar sebagai kemampuan minimal yang harus di capai oleh semua siswa. Penilaian kurikulum dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh pusat dan daerah. Penilaian dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Ada tiga ulangan dalam sistem KBK yaitu; [1] Ulangan harian, ulangan dapat dilaksanakan secara harian untuk menentukan ketuntasan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai hasil dan suatu proses pembelajaran. Ulangan harian dilaksanakan sehari-hari pada akhir suatu kemampuan dasar atau akhir suatu kegiatan pembelajaran sesuai dengan keperluan; [2] Ulangan akhir program, ulangan juga dapat diselenggarakan pada setiap akhir suatu program belajar seperti akhir semester dan akhir tahun pembelajaran dalam rangka pencapaian ketuntasan belajar siswa; [3] Benchmarking (tes unggulan), benchmarking merupakan suatu proses dan hasil untuk menuju keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan ditingkat sekolah, daerah dan nasional.

⁵³ Lihat pada citus: [www.kuleuven.ac.be/ppi/Leuven/Pertemuan Renberg / umum.kbk](http://www.kuleuven.ac.be/ppi/Leuven/Pertemuan%20Renberg%20umum.kbk). *Kurikulum berbasis kompetensi*, Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Naional, Kurikulum Berbasis Kompetensi kebijaksanaan umum, tanggal 25-12-2003.

Prinsip dalam bahasa Inggris *principle*. Dalam bahasa Latin *principium*, dari kata *primus* (pertama) dan *capere* (mengambil) yaitu sumber atau asal usul sesuatu.³⁵ Pengembangan KBK merupakan suatu proses yang dinamik dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keseimbangan etika, logika, estetika dan kinestika. KBK merupakan input instrumental yang digunakan untuk menyeimbangkan pengalaman belajar yang mengembangkan etika, estetika, logika dan kinestika.
2. Prinsip kesamaan memperoleh kesempatan. Setiap orang berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.
3. Prinsip memperkuat identitas nasional. KBK harus menanamkan dan mempertahankan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia melalui pemahaman terhadap pertumbuhan peradaban bangsa Indonesia dan sumbangan bangsa Indonesia terhadap peradaban dunia.
4. Prinsip menghadapi abad pengetahuan. Globalisasi dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi menyebabkan semakin meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan pasar bebas, kemampuan bersaing, penguasaan pengetahuan dan teknologi menjadi makin penting untuk kemajuan suatu bangsa.
5. Prinsip menyongsong tantangan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi merupakan tantangan fundamental yang dapat mengubah masyarakat biasa ke dalam masyarakat informasi dan masyarakat pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi berpotensi untuk menyediakan kemudahan belajar elektronik dan ilmu pengetahuan baru yang tidak tertulis dalam kurikulum.
6. Prinsip mengembangkan keterampilan. Pendidikan perlu menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan

³⁵ Lorens Bagus. *Op.Cit.*, hlm. 891.

keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan hidup yang terjadi di masyarakatnya.

7. Prinsip mengintegrasikan unsur-unsur penting ke dalam kurikulum. KBK mengintegrasikan pengetahuan, sikap tentang budu pekerti, hak asasi manusia, pariwisata, lingkungan hidup, kependudukan, kehutanan, home economics, pencegahan konsumerisme, pencegahan HIV/AIDS, penangkalan penyalahgunaan narkoba, perdamaian, demokrasi dan peningkatan konsensus pada nilai-nilai universal.
8. Prinsip pendidikan alternatif. Pendidikan tidak hanya terjadi secara formal di sekolah tapi juga harus terjadi di mana saja. Hal ini sangat penting terutama dalam rangka mencapai universal dan demokratisasi pendidikan.
9. Prinsip pembangun pengetahuan. KBK berupaya untuk memandirikan siswa belajar berkolaborasi, membantu teman, mengadakan pengamatan, penilaian diri untuk suatu refleksi, mendorong mereka untuk membangun pengetahuannya sendiri.
10. Prinsip pendidikan multikultur dan multi bahasa. Indonesia terdiri atas masyarakat dengan beragam budaya, bahasa dan agama. KBK harus dapat memenuhi unsur multikultur dan multi bahasa untuk seluruh bangsa Indonesia.
11. Prinsip penilaian berkelanjutan dan komprehensif. KBK harus menanggapi kebutuhan belajar siswa untuk mengetahui hasil belajarnya. Hasil belajar di pandang sebagai umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut terhadap segala kekurangan dan kelebihan selama belajar dalam kurun waktu tertentu.
12. Prinsip pendidikan seumur hidup. Pendidikan harus berlanjut seumur hidup dalam rangka mengembangkan kesadaran dan belajar tentang dunia yang berubah dalam segala bidang.

Implikasi berasal dari kata *implication*⁵⁴ berarti salah satu pernyataan dari pernyataan lainnya.⁵⁵ Implikasi dalam penerapan sistem KBK dapat terjadi sebagai berikut:

1. Jumlah jam berkurang. Dasar penerapan KBK bercirikan substansi pelajaran, hingga muatan pelajaran dapat berkurang namun mendalam.
2. Tema sajian terpadu. Keterpaduan sistem KBK bersifat komprehensif dan berkesinambungan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Keterpaduan ini mendalam dan lebih bermakna.
3. Penilaian berbasis sekolah. Penilaian dengan cara ini dimaksud untuk menyesuaikan keadaan sekolah dan keadaan siswa yang beragam dari seluruh Indonesia. Cara ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan standar mutu nasional.
4. Penerapan materi pelajaran berbasis kompetensi. Dasar kompetensi yang dikuasai siswa harus disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
5. Pendidik berbasis kompetensi. Penerapan KBK di tuntut agar guru terus mengusahakan kompetensinya yang merupakan suatu keharusan.

Keunggulan sistem KBK adalah sebagai berikut:

1. Menekankan pada belajar esensial.
2. Bersifat lentur.⁵⁶
3. Guru hanya membimbing.

Kelemahan sistem KBK adalah sebagai berikut:

1. Pendidik mempertahankan paradigma lama yang dimilikinya sudah cukup menjalankan tugasnya.
2. KBK kurikulum baru, sulit bagi guru dalam penerapannya khususnya di desa.

⁵⁴ John M Echols, *Op.Cit.*, hlm. 313.

⁵⁵ Tim penulis Rosda, Pengantar Jamaluddin Rakhmat, *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 155.

⁵⁶ Lihat: citus <http://www.berita-penabur.org> / 2002. 05 / artikel utama / kurikulum berbasis kompetensi. htm, *kerangka dasar kurikulum berbasis kompetensi*, tanggal 25-12-2003.

3. KBK belum diterapkan secara menyeluruh. kecuali diterapkan di lembaga pendidikan yang sudah maju.

Kurikulum berbasis kompetensi ialah sistem pengajaran baru muncul beralasan untuk peningkatan bidang pendidikan dengan alasan terjadinya global perdagangan bebas. Model kurikulum berbasis kompetensi, haruslah berlandaskan hasil analisis. Tugas guru disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pemakainya. Kebutuhan masyarakat di era reformasi dan pasar bebas, khususnya di negara Indonesia mengharuskan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dalam bidang pendidikan.

Untuk meningkatkan kurikulum berbasis kompetensi, atas kebijakan pemerintah dan masyarakat Indonesia, kurikulum 1994 disempurnakan. Sebab dipengaruhi dunia luar yang sudah maju dan perdagangan bebas, agar siswa dan guru, dapat bersaing melalui pendidikan yang ada. Dengan munculnya istilah kurikulum berbasis kompetensi, ini merupakan hal baru, sehingga penerapannya baru di lembaga pendidikan yang sudah maju.

Kesimpulan

KBK sangat dipengaruhi oleh pengertian kurikulum yang di anut seseorang. Ciri utama KBK ialah adanya nilai relevansi antara komponen kurikulum dengan tuntutan kebutuhan yang ada dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat.

Daftar Kepustakaan

- Andi Haris Prabama dan Siti Zuhriah Ari Atmi, *Paradigma pengembangan Kurikulum Pendidikan tinggi Tahun 2000*, Cet 1, (Surabaya: Muhammad University Press, 2002).
- Armida S. Alisjahbana, *Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*. Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional "*Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia*" diselenggarakan Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan

Yatimin, *Desentralisasi Pendidikan Islam...*

Bandung. Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, 20 Juli 1999.

Awani Irewati, *Belajar Otonomi Daerah dari Jepang*, Koran Harian *Jawa Pos* Edisi 16 Maret 2001.

Azwir Salam, *Dalam Potensia*, Jurnal Kependidikan Islam, Vol 2, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah, 2003).

Bailey, William J, *School-Site Management Applied*. (Lancaster-Basel: Technomic Publishing CO.INC 1991).

Bray, Mark, *Decentralization of Education: Community Financing*, (Washington DC: The World Bank, Directions in Development, 1996).

Burki, (et al), *Beyond the Centre: Decentralizing the State*, (Washington DC: The World Bank, 1999).

Burki, (et al), *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Methodology*, (Washington D.C: E. Perry and William R. Dillinger, 1999).

Dachnel Kamars, *Bahan Kuliah Teknologi Pendidikan*, Untuk mahasiswa Pendidikan Islam PPS IAIN SUSQA Pekanbaru, Tidak dipublikasikan.

Dekdikbud, *Pedoman pengembangan silabus*, (Jakarta: Dirjen Depdikbud, 2003).

Dewan Perwakilan Rakyat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 1999).

Edward B. Fieske (editor), *Decentralization Of Education, Politics And Concensus*, (Washington DC: The International Bank for Recontruction and Development, 1996).

Fakry Gaffar, *Implikasi Desentralisasi Pendidikan Menyongsong abad 21*, Dalam Jurnal Pendidikan Tahun 3 Oktober, Tahun IX, 1990.

Fasli Jalal, (ed), *Pendidikan Dalam konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicpta, 2001).

Gabort Halaz, *The Policy of shool Autonomy And The Reeeform Of Educaional Administration*, (Tidak dipublikasikan, 1992). Makalah ini dipresentasikan pada The Eighth Wordl Congress of Comparative Education. Tanggal 8 - 14 Juli 1992 di Pregue.

[http:// www.berita penabur.Org](http://www.berita.penabur.Org) / 2002. 05 / artikel utama / kurikulum berbasis kompetensi. htm, kerangka dasar kurikulum berbasis kompetensi, tanggal 25-12-2003.

[http:// www. kompas.com/ kompas-cetak/ 0101/ 12/ dikbud/ tanp09.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0101/12/dikbud/tanp09.htm)

[http:// www. clgi. or. id/ newsletter/ edisi-01/ CLGI. asp](http://www.clgi.or.id/newsletter/edisi-01/CLGI.asp)

[http:// www. Deliveri. org/ guidelines/ / policy/ pgibi. htm](http://www.Deliveri.org/guidelines/ /policy/pgibi.htm)

[http:// www. Deliveri. org/ guidelines/ / policy/ pgibi. htm](http://www.Deliveri.org/guidelines/ /policy/pgibi.htm)

[http:// www. depdiknas. go. id/ Jurnal/ 27/ manajemen berbasis sekolah. htm.](http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/27/manajemen%20berbasis%20sekolah.htm)

[http:// www. kompas. com/ kompas-cetak/ 0205/ 17/ dikbud/ foru09. htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/17/dikbud/foru09.htm)

Isjoni Ishaq, *Dalam Riau Pos*, Ahad 21 September 2003, hlm. 28.

Ki Hajar Dewantara. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian I: Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa, 1946).

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet 11, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

MPR RI, *TAP MPR, RI Nomor IV/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bab IV Butir E; Pendidikan, 1999, nomor 3, 4 dan 5.*

Noah Meriam, *Dictionary Of The English Laguage*, Secont edition, (William Collin Publishers, Co, 1980).

Panduan kajian Pembangunan Pemerintah Daerah. Pada Citus;
[http:// www. deliveri. org/ guidelines/ policy/ pg1/ pg 16i. htm](http://www.deliveri.org/guidelines/ policy/pg1/pg16i.htm)

Yatimin, *Desentralisasi Pendidikan Islam...*

Patrinos (et al), *Decentralization of Education: Demand Side Financing*, (Washington DC: The World Bank Directions in Development, 1997).

Poer wadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia Cet :12* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Print. M. *Curriculum Development and Design*, (St. Lionard: Allen & Unwim Pty, Ltd. 1993).

R.Nuriana, *Format Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Serta Pertumbuhan Otonomi Daerah*, dalam artikel of [http://id.appsi.or.id/ Artikel / mformat .htm](http://id.appsi.or.id/Artikel/mformat.htm).

R.O Slater, *On Centralization And School Restructuring A Socioillogical Perspektive*, (London: The Falmer Press, 1993).

Ricard.M Bird, Francois Vallaucort, *Viscal Decentralization In Developing Countries*, terj, Al Mizal Ulfa, (Cambrigade University, 2000).

Sadu Wasistiono, *Menata Ulang Managemen Pemerintah Daerah di Indonesia*, Dalam Citus [http://id.appsi.or.id/ Artikel/ mmenata.htm](http://id.appsi.or.id/Artikel/mmenata.htm).

Sayuti, *Otoda Kebijakan Yang Tak Nyata*, techno 5 dalam Citus [http://www.branwijaya.ac.id/student / techno/ sajut,%20techno5a.htm](http://www.branwijaya.ac.id/student/techno/sajut,%20techno5a.htm)

Sumardi HS, *Relevansi Pendidikan Ditinjau Dari Kepentingan Nasional, Wilayah Dan Peserta Didik*, dalam jurnal *Mimbar Pendidikan*, Nomor. 3 Tahun IX, Oktober 1990.

TAP MPR RI No. IV/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004. Bab IV Butir E Pendidikan No. 3, 4 dan 5.

Tim penulis Rosda, Pengantar Jamaluddin Rakhmat, *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995).

Udik Budi Wibowo, *Pergeseran Pengelolaan Pendidikan Dari Sentralisasi Ke Desentralistik*, (Jurnal Dinamika Pendidikan, FIP-UNY, 2000).

Undang-Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Arkala, 2000).

Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No.2 Tahun 1989 dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

Winarno Surakhmad, *Mencari Paradigma Kurikulum Masa Depan*, (Makalah tdk dipublikasikan) disampaikan pada seminar Orientasi, Kurikulum, di Pusat Kurikulum Bogor, 27 Maret - 29 Maret. 2000.

www. Kuleuven. ac.be/ppi.Leuven/Pertemuan Renberg / umum. kbk. *Kurikulum berbasis kompetensi*, Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Naional, Kurikulum Berbasis Kompetensi kebijakan umum, tanggal 25-12-2003.

Yus Badudu, M. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).

Zakiah Dradjad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).